

GENCARKAN Desa Sanur Kaja: Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan guna Mewujudkan Masa Depan Masyarakat Sejahtera

Ni Putu Riski Martini ^{1*}, Gde Deny Larasdiputra ², I Gde Agung Wira Pertama ³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia.

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia.

Corresponding Email: riskimartini@gmail.com ^{1*}

Histori Artikel:

Dikirim 2 September 2026; *Diterima dalam bentuk revisi* 25 September 2026; *Diterima* 28 September 2026; *Diterbitkan* 30 September 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Kesenjangan inklusi dan literasi keuangan digital menempatkan sektor domestik pada posisi rentan terhadap eksploitasi produk ilegal. Program KKN Literasi dan Inklusi Keuangan bertajuk "Edukasi Keuangan Ngiring ke Banjar" ini bertujuan memperkuat manajemen finansial domestik dan membangun kecakapan proteksi diri khalayak sasaran dari ancaman kejahatan siber. Kegiatan dilaksanakan secara luring pada Selasa, 28 Juli 2026 di Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja, Denpasar Selatan, melibatkan 54 anggota PKK Desa Sanur Kaja bersama narasumber Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali. Pendekatan partisipatif diterapkan secara terintegrasi dengan agenda arisan bulanan warga. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman finansial melalui internalisasi formula perencanaan keuangan sehat dan pengadopsian prinsip Legal dan Logis. Peserta juga terbukti cakap mengoperasikan infrastruktur pengaduan resmi Kontak OJK 157, portal SIPASTI, dan Indonesia Anti-Scam Centre guna menangani modus penipuan daring.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; Perlindungan Konsumen; Investasi Bodong; Pinjaman Online Ilegal.

Abstract

Gaps in digital financial inclusion and literacy leave the domestic sector vulnerable to exploitation by illegal financial products. The "Edukasi Keuangan Ngiring ke Banjar" program—part of the Financial Literacy and Inclusion Community Service initiative—aims to strengthen household financial management and equip the target audience with self-protection skills against cybercrime threats. The activity was conducted offline on Tuesday, July 28, 2026, at the Sanur Kaja Village Office in South Denpasar, involving 54 members of the Sanur Kaja Village Family Welfare Empowerment (PKK) group and resource persons from the Bali Province Financial Services Authority (OJK). A participatory approach was implemented, integrated with the residents' monthly arisan gathering. Program results demonstrated improved financial understanding through the internalization of healthy financial planning formulas and the adoption of the Legal and Logical principles. Participants also demonstrated proficiency in operating official complaint channels, including OJK Contact 157, the SIPASTI portal, and the Indonesia Anti-Scam Centre to handle online fraud schemes.

Keyword: Financial Literacy; Consumer Protection; Fraudulent Investment; Illegal Online Loans.

1. Pendahuluan

Di era transformasi digital saat ini, sektor jasa keuangan berkembang dengan sangat masif dan menawarkan berbagai kemudahan akses finansial melalui *platform* digital seperti perbankan, pasar modal, pegadaian, asuransi, hingga pinjaman daring (pindar). Transisi menuju digitalisasi finansial ini membawa perubahan urgen pada pola konsumsi dan pengelolaan instrumen ekonomi di tingkat mikro. Namun, akselerasi teknologi finansial yang begitu cepat memicu tantangan baru yang cukup serius di tengah masyarakat akibat adanya kesenjangan literasi yang lebar.

Berdasarkan data nasional Otoritas Jasa Keuangan (2024) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 65,43%, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan telah menyentuh 75,02%. Kesenjangan sebesar hampir 10% ini mengindikasikan sebuah anomali ketika banyak masyarakat telah aktif memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan, namun belum dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai hak, kewajiban, dan aspek perlindungan konsumen. Kondisi tersebut dipertegas oleh temuan Nasharuddin *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa penetrasi *financial technology* yang agresif di masyarakat sering kali tidak diiringi oleh kesiapan pengetahuan finansial yang matang, sehingga memicu perilaku konsumsi yang tidak sehat. Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi maraknya kasus kejahatan siber finansial dan jeratan utang di berbagai daerah.

Fenomena di lapangan menunjukkan tingginya angka masyarakat yang terjebak dalam skema investasi bodong akibat tergiri iming-iming keuntungan tinggi yang tidak masuk akal. Modus ini kerap didorong oleh faktor psikologis seperti fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) dan tren *flexing* kekayaan di media sosial untuk menjaring korban. Dwiantari *et al.* (2025) menggarisbawahi bahwa rendahnya literasi keuangan berbanding lurus dengan tingginya kerentanan masyarakat terhadap modus penipuan berkedok investasi fiktif tersebut. Di saat yang sama, jebakan pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan judi *online* kian meresahkan dengan menawarkan syarat instan namun menerapkan bunga tinggi yang tidak transparan serta metode penagihan yang koersif. Sebagaimana diungkapkan oleh riset Supriadi *et al.* (2026), minimnya selektivitas masyarakat dalam memeriksa legalitas penyelenggara di *platform* digital menjadi faktor utama tingginya angka korban kejahatan finansial siber.

Berdasarkan publikasi data dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali (2026) yang merujuk pada riset NoLimit Indonesia, kelompok ibu rumah tangga menempati porsi korban pinjol yang sangat signifikan, yakni sebesar 18%. Angka ini menegaskan adanya kerentanan finansial yang nyata pada sektor domestik. Efek domino dari jeratan pinjol ilegal, judi *online*, serta penipuan siber berbasis manipulasi psikologis (*social engineering*) dan *phishing*—seperti pengiriman *file* APK palsu, *skimming*, hingga *card tapping*—sangat destruktif bagi ketahanan sosial keluarga. Wulandari dan Saputra (2025) dalam studinya menambahkan bahwa dampak buruk jeratan keuangan digital tidak hanya merugikan secara materiil, melainkan memicu gangguan kesehatan mental yang berujung pada tingginya angka perceraian, disharmonisasi rumah tangga, hingga tindakan nekat bunuh diri.

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya edukasi bagi para manajer keuangan domestik di tingkat rumah tangga. Sebagai pengelola utama anggaran belanja, kelompok ibu rumah tangga memegang peranan krusial dalam menentukan stabilitas ekonomi mikro keluarga. Menurut penelitian Adnyana *et al.* (2025), kemampuan ibu rumah tangga dalam melakukan *budgeting* secara ketat memegang kendali penuh terhadap ketahanan finansial keluarga dari guncangan inflasi dan krisis utang piutang. Tanpa adanya pemahaman yang matang mengenai manajemen keuangan sehat—seperti formula ideal 40% untuk biaya rumah tangga, 30% untuk cicilan utang, 20% untuk tabungan/investasi/proteksi, dan 10% untuk biaya sosial—serta penanaman prinsip 2L (Legal dan Logis) dalam memilih instrumen investasi, sektor domestik akan terus menjadi sasaran empuk eksploitasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, diperlukan program edukasi keuangan yang komprehensif dan menyentuh akar rumput untuk membangun benteng proteksi finansial yang kuat. Pratama *et al.* (2025) dalam penelitiannya membuktikan bahwa program sosialisasi literasi keuangan kontekstual yang memanfaatkan forum komunitas lokal terbukti efektif dalam mereduksi risiko jeratan aktivitas

keuangan ilegal. Hal ini didukung oleh temuan Budiman *et al.* (2026) yang menegaskan bahwa intervensi edukasi berbasis kearifan lokal (*grassroots engagement*) seperti pemanfaatan banjar atau perkumpulan PKK terbukti meningkatkan daya serap materi literasi secara signifikan dibandingkan sosialisasi formal searah.

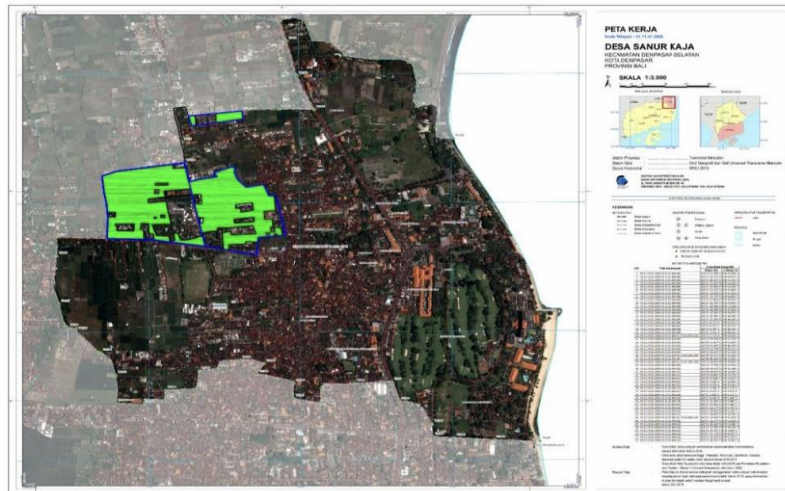
Melalui pemahaman yang mendalam mengenai tugas pokok OJK dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi produk keuangan legal dengan prinsip 3P (Paham, Punya, Pantau), mempraktikkan pengecekan rekam kredit mandiri *via* iDeb SLIK OJK, serta aktif memanfaatkan kanal aduan resmi perlindungan konsumen seperti Kontak OJK 157, portal SIPASTI, dan IASC (Indonesia Anti-Scam Centre). Atas dasar urgensi tersebut dan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan), laporan pengabdian masyarakat ini disusun guna menjabarkan strategi penguatan literasi dan inklusi keuangan demi mewujudkan masyarakat yang cerdas, bijak, dan aman secara finansial.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2026 di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi dengan tujuan kegiatan, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kesesuaian karakteristik demografis dengan target sasaran di tengah agenda rutin komunitas warga setempat. Sasaran kegiatan adalah kelompok ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sanur Kaja sebanyak 54 orang yang dipilih berdasarkan peran sentralnya sebagai manajer keuangan domestik skala mikro dan risiko kerentanan terhadap paparan kejahatan siber finansial. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

- 1) Tahap Persiapan: Tim KKN LIK melakukan survei indeks literasi awal, berkoordinasi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali serta Pemerintah Desa Sanur Kaja, dan menyusun modul edukasi pengelolaan keuangan dengan formula 40-30-20-10, materi prinsip 2L (Legal dan Logis), serta materi sosialisasi perlindungan konsumen digital.
- 2) Tahap Pelaksanaan: Implementasi program bertajuk "Edukasi Keuangan Ngiring ke Banjar" diselenggarakan secara luring (*offline*). Aktivitas di lapangan mencakup penyampaian materi regulasi OJK oleh narasumber ahli, pemaparan bahaya pinjaman *online* ilegal dan investasi bodong, diskusi interaktif bedah kasus manipulasi berkas aplikasi palsu berformat APK, serta panduan praktis pengaduan resmi.
- 3) Tahap Evaluasi: Pengukuran pemahaman peserta dan kebermanfaatan materi dilakukan secara adaptif melalui observasi partisipatif langsung selama proses tanya jawab serta pengisian kuesioner tingkat kepuasan di akhir sesi. Mengingat komitmen efisiensi waktu karena menyatu dengan agenda internal arisan warga, instrumen *pre-test* dan *post-test* tertulis ditiadakan guna mengoptimalkan alokasi interaksi edukatif narasumber.
- 4) Tahap Tindak Lanjut: Pendampingan pascakegiatan diinisiasi bersama pengurus kader setempat melalui pembentukan kanal komunikasi daring untuk memfasilitasi warga yang memerlukan panduan lanjutan terkait pengecekan rekam kredit mandiri *via* iDeb SLIK OJK maupun mekanisme pelaporan siber ke Kontak OJK 157, SIPASTI, dan IASC.

Tingkat ketercapaian keberhasilan program dinilai menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek perubahan pengetahuan, sikap, dan respons khalayak sasaran. Seluruh data dokumentasi dan observasi kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan komunitas yang terintegrasi dengan kearifan lokal banjar serta merumuskan rekomendasi keberlanjutan program sejenis di masa mendatang.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Desa Sanur Kaja.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan bertajuk "Edukasi Keuangan Ngiring ke Banjar" telah direalisasikan secara luring di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada Selasa, 28 Juli 2026. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri secara penuh oleh 54 peserta yang seluruhnya merupakan anggota aktif Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sanur Kaja. Berdasarkan pencatatan daftar hadir dan lembar observasi demografis, seluruh khalayak sasaran merupakan perempuan dalam usia produktif dengan peran ganda yang sentral, baik sebagai ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro di sektor kuliner dan kerajinan, maupun pekerja sektor industri pariwisata. Pemetaan awal menunjukkan bahwa 100% peserta telah memiliki akses langsung terhadap produk inklusi keuangan digital seperti rekening perbankan, dompet digital, hingga fasilitas belanja tunda. Melalui keterlibatan narasumber ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, materi regulasi mengenai tugas OJK dalam mengatur dan mengawasi aspek *prudential* maupun *market conduct* serta perlindungan konsumen berhasil disampaikan secara merata. Luaran kegiatan ditunjukkan oleh peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban perlindungan konsumen di sektor digital serta bahaya laten kejahatan finansial siber yang mengancam stabilitas domestik.

Transfer keilmuan difokuskan pada dua materi pokok perlindungan finansial. Materi pertama berfokus pada internalisasi formula perencanaan keuangan sehat yang memisahkan pendapatan keluarga ke dalam pos pengeluaran berimbang, yaitu: 40% untuk biaya konsumsi rumah tangga, batasan maksimal 30% untuk alokasi cicilan utang produktif, batasan minimal 20% untuk tabungan, investasi legal, dan dana darurat, serta 10% untuk pemenuhan kewajiban sosial keagamaan yang melekat pada adat setempat. Peserta memperoleh simulasi visual konkret penyusunan anggaran belanja bulanan untuk menghindari defisit akibat perilaku konsumtif yang tidak terencana.

Materi kedua yang didiskusikan adalah doktrin prinsip 2L (Legal dan Logis) sebagai filter utama dalam mendeteksi dan menolak tawaran investasi bodong serta pinjaman *online* ilegal. Sesi ini membedah studi kasus penipuan digital berbasis manipulasi psikologis (*social engineering*) dan penyebaran berkas aplikasi palsu berformat APK yang marak memicu kebocoran data pribadi. Sebagai langkah mitigasi teknis, peserta dibekali panduan pengoperasian saluran pengaduan resmi terpadu yang disediakan regulator, meliputi Kontak OJK 157 *via* sambungan telepon maupun pesan WhatsApp resmi, portal pemetaan entitas ilegal SIPASTI, serta saluran pelaporan penipuan cepat *via* Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengisian kuesioner tingkat kepuasan peserta dan dokumentasi visual program sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



(a) Kegiatan Pemberian Materi



(b) Kegiatan Pemberian Materi

Gambar 2. Kegiatan Dokumentasi

3.2 Pembahasan

Temuan di lapangan mengenai karakteristik demografis ibu-ibu PKK Desa Sanur Kaja memperlihatkan anomali yang selaras dengan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2024), yaitu adanya disparitas yang lebar antara indeks inklusi keuangan yang tinggi dan indeks literasi keuangan yang masih terbatas. Ketersediaan akses internet dan kemudahan administrasi digital mendorong para ibu rumah tangga di Desa Sanur Kaja mengadopsi berbagai platform finansial digital tanpa diimbangi pemahaman komprehensif mengenai risiko hukum serta beban bunga berjalan. Realitas ini menempatkan sektor domestik pada posisi rentan terhadap eksploitasi produk ilegal. Merujuk data publikasi OJK Provinsi Bali (2026), kelompok ibu rumah tangga menyumbang 18% dari total korban pinjaman *online* ilegal. Tingginya angka ini berpangkal pada peran ibu rumah tangga sebagai pengelola utama arus kas keluarga yang rentan mengambil jalan pintas pembiayaan instan saat menghadapi kebutuhan mendesak atau tekanan sosial. Ketidaksiapan literasi ini diperparah oleh agresivitas manipulasi psikologis pelaku kejahatan siber yang memicu stres finansial serta instabilitas keharmonisan rumah tangga (Wulandari & Saputra, 2025). Kondisi tersebut menegaskan bahwa penanaman formula anggaran berimbang 40-30-20-10 dan ketelitian seleksi platform digital berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang esensial guna memperkuat resiliensi ekonomi mikro keluarga (Adnyana *et al.*, 2025; Supriadi *et al.*, 2026).

Tingginya tingkat kehadiran peserta di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Sanur Kaja didukung oleh strategi penempatan kegiatan yang melekat pada agenda rutin arisan bulanan warga. Pendekatan berbasis kearifan lokal (*grassroots engagement*) ini terbukti menciptakan kenyamanan psikologis dan meminimalkan resistensi partisipasi khalayak sasaran yang memiliki beban aktivitas domestik padat. Sebagaimana ditegaskan oleh Budiman *et al.* (2026), integrasi edukasi pada institusi nonformal lokal seperti perkumpulan banjar mampu mengakselerasi penerimaan materi dibandingkan format sosialisasi satu arah yang kaku.

Kendati demikian, pendekatan ini membawa konsekuensi keterbatasan alokasi waktu operasional karena tim pelaksana harus berbagi jadwal dengan agenda internal organisasi mitra. Ketiadaan data pengujian tertulis formal (*pretest* dan *posttest*) merupakan langkah adaptif terencana agar durasi yang tersedia dapat dimanfaatkan seutuhnya untuk pemaparan interaktif narasumber OJK dan simulasi pengaduan kejahatan siber. Pendekatan fleksibel yang memprioritaskan pemahaman praktis dibandingkan formalitas administratif ini sejalan dengan rekomendasi Pratama *et al.* (2025). Efektivitas transfer informasi tetap terverifikasi secara kualitatif melalui observasi keaktifan peserta selama sesi bedah kasus iDeb SLIK OJK serta perolehan skor kepuasan yang tinggi pada lembar kuesioner akhir kegiatan.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan bertajuk "Edukasi Keuangan Ngiring ke Banjar" di Desa Sanur Kaja telah berjalan dengan baik dan mencapai target luaran yang diharapkan. Intervensi edukasi terstruktur bersama narasumber ahli Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali berhasil menjawab anomali kesenjangan antara tingginya akses inklusi digital dan rendahnya literasi finansial pada sektor domestik. Melalui model penyampaian materi yang inklusif, anggota PKK Desa Sanur Kaja memperoleh pemahaman komprehensif mengenai regulasi perlindungan konsumen serta terampil menerapkan formula pengelolaan keuangan berimbang 40-30-20-10 guna menjaga stabilitas ekonomi keluarga dari ancaman utang konsumtif dan tekanan inflasi. Selain itu, penanaman prinsip 2L (Legal dan Logis) serta pengenalan kanal pengaduan resmi—seperti Kontak OJK 157, portal SIPASTI, dan Indonesia Anti-Scam Centre—terbukti efektif meningkatkan kecakapan teknis dan kewaspadaan kritis peserta dalam menangkal kejahatan siber finansial seperti penipuan berkas aplikasi palsu berformat APK, investasi bodong, judi *online*, serta jeratan pinjaman *online* ilegal.

Meskipun kegiatan menghadapi keterbatasan alokasi waktu akibat integrasi dengan agenda arisan bulanan warga, keputusan adaptif untuk meniadakan pengujian formal tertulis dan menggantinya dengan simulasi visual interaktif menjadi langkah yang efisien di lapangan. Sebagai upaya optimalisasi kegiatan sejenis di masa mendatang, tim pelaksana berikutnya disarankan merancang koordinasi jadwal yang lebih intensif bersama perangkat desa dan pengurus komunitas mitra. Penyediaan alokasi waktu khusus yang mandiri dan terpisah dari agenda rutin warga sangat diperlukan agar sesi simulasi teknis lanjutan, seperti pengecekan status kolektibilitas kredit secara mandiri melalui *platform* iDeb SLIK OJK, dapat dipraktikkan secara lebih mendalam dan optimal oleh setiap peserta.

5. Daftar Pustaka

- Adnyana, I. M., Lestari, N. P. N., & Wiguna, I. G. A. (2025). Peran manajemen keuangan domestik dalam menjaga resiliensi ekonomi keluarga menghadapi tekanan inflasi. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, 4(1), 15–24.
- Budiman, A., Siregar, H., & Pratama, R. (2026). Efektivitas intervensi edukasi berbasis kearifan lokal (*grassroots engagement*) melalui optimalisasi komunitas banjar dan kelompok penggerak PKK. *Jurnal Sosio-Humaniora dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 112–121.
- Dwiantari, K. A., Putra, I. B. G., & Suardani, A. A. (2025). Analisis hubungan literasi keuangan dengan tingkat kerentanan masyarakat terhadap penipuan berkedok investasi fiktif. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 13(3), 204–215.
- Nasharuddin, M., Wahyudi, T., & Rahmawati, E. (2025). Penetrasi teknologi keuangan (*financial technology*) dan dampaknya terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat modern. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Digital*, 6(1), 45–56.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. OJK Republik Indonesia. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali. (2026). *Materi Edukasi Keuangan: Bijak Mengelola Keuangan, Waspada Investasi Ilegal dan Kejahatan Keuangan Digital*. Kantor OJK Provinsi Bali.

- Pratama, I. W. S., Jayanti, Ny. M. D., & Sukmawati, P. S. (2025). Strategi sosialisasi literasi keuangan kontekstual pada kelompok rentan di tingkat regional. *Jurnal Aplikasi dan Pengabdian Masyarakat Keuangan*, 3(2), 89–98.
- Supriadi, M., Hakim, L., & Wijaya, C. (2026). Selektivitas masyarakat dalam penggunaan *platform* keuangan digital berbasis izin regulasi. *Jurnal Keamanan Siber dan Perlindungan Konsumen*, 5(1), 76–85.
- Wulandari, S., & Saputra, D. (2025). Dampak psikososial dan kesehatan mental akibat jeratan utang pinjaman *online* ilegal pada lingkungan domestik. *Jurnal Ketahanan Keluarga dan Konseling Kesejahteraan*, 11(2), 130–142.